



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 22 MEI 2008

A. PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
I. KELEMBAGAAN, PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA DAN PENDAFTARAN TANAH						
A. Memperkuat Kelembagaan Pelayanan Penanaman modal	1. Penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal.	a. Menyusun Tata Cara dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Presiden tentang Tata cara dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Juni 2008	Tata cara penanaman modal yang jelas dan sederhana bagi penanaman modal.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		b. Menyelesaikan aturan tentang norma dan standar sesuai Tata Cara Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Peraturan Kepala BKPM	Juni 2008	Kejelasan mengenai norma dan standar dalam tatacara dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penanaman modal.	Kepala BKPM

c. Menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. Menyusun Kebijakan Umum Penanaman Modal.	Kebijakan Umum Penanaman Modal	Juli 2008	Rencana umum penanaman modal yang jelas dan terarah.	Kepala BKPM
	2. Fasilitas non-fiskal bagi penanaman modal	a. Merumuskan fasilitas keimigrasian	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia	Juli 2008	Tersedianya fasilitas keimigrasian yang memudahkan bagi penanam modal.	Menteri Hukum dan HAM
		b. Merumuskan kebijakan untuk mempermudah impor barang modal dan bahan baku proyek-proyek penanaman modal	Peraturan Menteri Perdagangan	Juli 2008	Kemudahan impor barang modal dan bahan baku proyek-proyek penanaman modal	Menteri Perdagangan
	3. Fasilitas Fiskal Bagi Penanaman Modal	Menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007	Juni 2008	Penambahan bidang usaha dan daerah tertentu yang mendapatkan fasilitas keringanan PPh bagi penanam modal.	Menteri Keuangan

4. Percepatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	4. Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi	a. Merumuskan Kebijakan Penanaman Modal pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Ekonomi Khusus ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).	Juni 2008	Tersedianya insentif fiskal dan non fiskal pada penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus	Kepala BKPM
		b. Menetapkan Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	Peraturan Presiden	Juni 2008	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya perangkat kelembagaan dan meningkatkan kepastian usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Efektifitas pelaksanaan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		c. Menetapkan keanggotaan Dewan Kawasan Batam, Dewan Kawasan Bintan, dan Dewan Kawasan Karimun	Keputusan Presiden	Juni 2008		

5. Pemantauan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	5. Pemantauan pendirian perusahaan	Memonitor pelaksanaan pendirian perusahaan	Diseminasi informasi berkala triwulanan mengenai waktu pendirian perusahaan dimulai dari pengecekan nama sampai dengan Pengesahan pendirian PT	Juni 2008 - berlanjut	Tercapainya waktu pengesahan pendirian PT maksimal 7 hari	Menteri Hukum dan HAM
	6. Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	a. Menyusun database informasi penanaman modal nasional, daftar Negatif Penanaman modal, jenis perizinan dan persyaratan penanaman modal dan peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal	Database informasi	Juni 2008 dan berlanjut	Tersedianya informasi perkembangan penanaman modal dan potensi penanaman modal persektor, daerah, dan nasional; penanaman modal yang tertutup dan terbuka bersyarat, jenis perizinan dan pelayanan penanaman modal	Kepala BKPM

b. Menyusun ...

--	--	--	--	--	--	--



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Menyusun cetak biru pembangunan kelembagaan, SDM, <i>business process</i> dan teknologi informasi dan komunikasi SPIPISE	Cetak biru SPIPISE	Agustus 2008	Adanya desain pembangunan SPIPISE	Kepala BKPM
		c. Membangun Portal Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronika	Terbangunnya Portal SPIPISE	November 2008 dan berlanjut	Adanya portal SPIPISE	Kepala BKPM
		d. Menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronika	Beroperasinya <i>pilot project</i> Tahap Kesatu	Desember 2008 dan berlanjut	Beroperasinya SPIPISE di 3 lokasi untuk subsektor prioritas nasional	Kepala BKPM
			Beroperasinya <i>pilot project</i> tahap kedua	Maret 2009 Dan berlanjut	Beroperasinya SPIPISE di 5 lokasi untuk subsektor prioritas nasional	
			Beroperasinya	November	Adanya kemudahan	Beroperasinya ... Kepala BKPM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			SPIPISE secara nasional	2009 dan berlanjut	pelayanan informasi dan perijinan penanaman modal di Indonesia	
B. Penyederhanaan Perizinan Usaha	1. Penyederhanaan perizinan di tingkat nasional	a. Melakukan pemetaan dan rekomendasi perizinan usaha pada sektor-sektor ekonomi kunci oleh Timnas Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) dan SPIPISE	Rumusan kebijakan penyederhanaan izin-izin usaha	Desember 2008 dan berlanjut	Dihasilkannya rumusan Kebijakan untuk mengurangi izin-izin usaha yang tumpang tindih dan membebani dunia usaha	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		b. Penyederhanaan izin-izin untuk melakukan usaha yang diterbitkan departemen	Peraturan Menteri terkait	Juni 2009 & berlanjut	Izin-izin usaha yang membebani dunia usaha serta waktu dan biaya pengurusan menjadi berkurang	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	2. Penyederhanaan perizinan di	a. Pengurangan jumlah hari untuk memulai usaha	Instruksi Gubernur DKI Jakarta tentang	Juni 2008	Berkurangnya waktu untuk memperoleh	2. Penyederhanaan ... Gubernur DKI Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	daerah.	melalui pilot project di Provinsi DKI Jakarta	penyederhanaan prosedur dan pengurangan waktu untuk memulai usaha di Jakarta		perizinan usaha di DKI Jakarta menjadi 38 hari.	
		b. Pemetaan dan penyampaian kebijakan penyederhanaan perizinan melalui pilot project di Provinsi DKI Jakarta	Rumusan kebijakan untuk penyederhanaan izin-izin usaha	Desember 2008	Rumusan kebijakan untuk mengurangi izin-izin usaha yang tumpang tindih dan membebani dunia usaha di DKI Jakarta	Gubernur DKI Jakarta
		c. Penyederhanaan izin-izin usaha melalui pilot project di Provinsi DKI Jakarta	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk penyederhanaan izin usaha	Mei 2009 dan berlanjut	Izin-izin usaha yang tumpang tindih dan membebani dunia usaha menjadi berkurang di DKI Jakarta	Gubernur DKI Jakarta

C. Pendaftaran ...

C. Pendaftaran Tanah	1. Penyederhanaan Proses pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	a. Percepatan proses pelayanan PBB dan BPHTB	i) Peraturan Dirjen Pajak tentang Standar Penelitian Surat Setoran Bea	Juni 2008	Penyelesaian permohonan Wajib Pajak atas penelitian SSB menjadi 1 hari kerja	Menteri Keuangan
----------------------	--	--	--	-----------	--	------------------



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB-BPHTB)		dari sebelumnya 2 hari kerja, dalam hal tidak memerlukan penelitian lapangan	
			ii) SE Dirjen Pajak tentang Standar Penerbitan Surat Keterangan NJOP	Juni 2008	Percepatan penerbitan informasi BJOP dan penyelesaian permohonan Wajib Pajak atas penerbitan surat keterangan NJOP menjadi 1 hari kerja dari sebelumnya 3 hari kerja, dalam hal objek PBB sudah terdaftar.	
			iii) SE Dirjen Pajak penegasan bahwa hanya SSB Nihil yang diketahui/ditandatangani oleh PPAT	Juni 2008	Menegaskan bahwa hanya SSB nihil yang diketahui/ditandatangani oleh PPAT	
				iv) SE Dirjen Pajak tentang standar penerbitan salinan SPPT	Juni 2008	Penyelesaian permohonan Wajib Pajak atas penerbitan salinan SPPT dalam 1 hari kerja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Peningkatan pelayanan informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> .	a. Membentuk Tim mengenai pengembangan sistem pelayanan informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> .	Sura Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim pelayanan informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> .	Juni 2008	Kejelasan tentang pembagian kerja dalam penyusunan sistem pelayanan informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> .	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		b. Menyusun Program Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> .	Program Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> .	November 2008	Dimilikinya suatu program aplikasi yang dapat menjamin pelayanan informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> , sehingga menjadi mudah, cepat dan efisien.	Kepala BPN
		c. Mengoperasikan pilot project Sistem Pelayanan Informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> di Jakarta	Keputusan Kepala BPN tentang pilot project Sistem Pelayanan Informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara	Desember 2008	Penerapan Pelayanan Informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-Line</i> di Jakarta sebagai <i>pilot project</i> .	Kepala BPN

c. Mengoperasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			on-line di Jakarta			
		d. Pengoperasian secara bertahap pada tingkat nasional Sistem Pelayanan Informasi pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i>	Sistem Pelayanan Informasi pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> di tingkat nasional	Februari 2009 dan berlanjut	Pelayanan informasi dan pendaftaran sertifikat tanah yang lebih mudah, cepat dan berbiaya rendah	Kepala BPN
II. KELANCARAN ARUS BARANG & KEPABEANAN						
A. Kelancaran arus barang ekspor dan impor	1. Penataan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor.	Menyusun kebijakan umum pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor.	Penetapan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor.	Juni 2008	Tertatanya pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor.	Menteri Perhubungan
					2. Percepatan ...	
	2. Percepatan proses pengeluaran barang impor dan ekspor (<i>Customs Clearance</i>)	a. Menyempurnakan manajemen resiko kepabeanaan	Profil Importir berdasarkan Negara Asal untuk Penetapan Jalur Dalam Pelayanan Impor.	Juli 2008	Penetapan jalur pelayanan secara cepat dan tepat serta meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan kepabeanaan.	Menteri Keuangan
		b. Perbaiki akses	i) Peningkatan jalan	Desember 2008	Peningkatan kualitas	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		transportasi dari kawasan industri ke pelabuhan	nasional (Bekasi-Cikarang)		akses transportasi dari kawasan industri menuju pelabuhan	Pekerjaan Umum
			ii) Peningkatan/ pelebaran jalan raya Cibarusah (Lemahabang-Mekamukti)	Desember 2008		
			iii) Peningkatan/ Pelebaran Jalan Cakung-Cilincing	Juni 2008		
			iv) Pembangunan <i>Fly Over</i> Cikarang	Desember 2008		
			v) Penambahan lajur jalan tol Cikarang-Cikarang Timur	Juni 2009		v) Penambahan ... Menteri Pekerjaan Umum
B. Pengembangan Fasilitas Kepabeanan (<i>Customs Facilities</i>)	Penyempurnaan Ketentuan Tempat Penimbunan Berikat (TPB)	Menyusun peraturan tentang TPB untuk mengakomodasi tambahan jenis TPB baru.	Peraturan Menteri Keuangan	Juli 2008	Pengguna dan penanaman modal di TPB meningkat	Menteri Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB		
C. Penguatan Pelayanan Publik untuk Mendorong Perdagangan Luar Negeri	1. Melanjutkan Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW (<i>National Single Window</i>)	a. Implementasi Tahap Kedua penerapan sistem NSW	i) Beroperasinya sistem NSW Impor untuk Importir <i>kelompok risiko rendah</i> (MITA Prioritas, MITA Non Prioritas, <i>Low-Risk Importer</i>) di Tanjung Priok	Juni 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan pengurusan penyelesaian impor oleh seluruh importir & PPJK • Interkoneksi dan interoperabilitas antar sistem di semua GA dalam pelayanan impor • Peningkatan kinerja pelayanan dan pengawasan arus barang impor di Tanjung Priok 	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		
			ii) Jumlah instansi yang terlibat bertambah menjadi 15					
			iii)Terbangunnya Desain Teknis dan Model untuk Sistem NSW Ekspor.				iii) Terbangunnya ...	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
			iv)Sistem NSW Sea Port diuji coba					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 13 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			integrasi ke dalam portal NSW di Tanjung Priok			
			v) Terbangunnya Desain Teknis dan model sistem NSW <i>Air Port</i>			

		b. Implementasi Tahap Ketiga penerapan sistem NSW	i) Sistem NSW Impor diterapkan secara penuh untuk seluruh Importir di 5 pelabuhan utama ii) Semua instansi yang terkait terlibat	Desember 2008	<ul style="list-style-type: none"> •Kemudahan pengurusan penyelesaian impor & ekspor •Interkoneksi dan interoperabilitas antar sistem di semua GA dalam pelayanan impor dan ekspor •Peningkatan kinerja 	b. Implementasi ... Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
--	--	---	---	---------------	--	--



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 14 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iii) Sistem NSW Ekspor sudah mulai diterapkan di Tanjung Priok iv) Sistem NSW Sea Port diterapkan secara mandatory di Pelabuhan Tanjung Priok		pelayanan dan pengawasan arus barang ekspor di Tanjung Priok dan impor di 5 pelabuhan utama	
			v) Sistem NSW Air-Port diterapkan secara mandatory di Bandara Soekarno-Hatta vi) Interkoneksi melalui Portal NSW sudah menerapkan sistem pelayanan secara SSO (<i>Single</i>	Desember 2008		v) Sistem ... Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 15 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			<i>Sign On)</i>			
		c. Implementasi Tahap Nasional sistem NSW Impor dan sistem NSW Ekspor	Sistem NSW Impor dan NSW Ekspor diterapkan secara penuh di 5 pelabuhan utama, NSW Sea Port di 4 pelabuhan utama dan sistem NSW Air Port diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta	April 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan pengurusan penyelesaian impor & Ekspor • Interkoneksi dan interoperabilitas antar sistem di semua GA dalam pelayanan impor dan ekspor 	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
					<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja pelayanan dan pengawasan arus barang ekspor dan impor di 5 pelabuhan utama 	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		d. Menyiapkan Peraturan Pelaksanaan Penggunaan Sistem Elektronik dalam kerangka INSW	Peraturan Menteri/ Kepala Badan/ Lembaga terkait	Juni - Desember 2008	Adanya dasar hukum bagi pengoperasian Sistem NSW	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 16 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		e. Menyiapkan bentuk kelembagaan bagi pengoperasian sistem NSW	Terbentuknya lembaga pelaksana operasional INSW	Desember 2008	Pengelolaan pelayanan publik melalui sistem INSW yang profesional	
		f. Mempersiapkan Integrasi sistem NSW ke dalam sistem <i>ASEAN Single Window</i> (ASW)	Sistem INSW terintegrasi dengan sistem ASW	Juni 2009	Terintegrasinya sistem INSW ke dalam Sistem ASW	
	2. Sinkronisasi Kebijakan Logistik	Penyusunan cetak biru dan penyusunan peraturan-peraturan mengenai jasa logistik nasional.	i) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Nasional Jasa Logistik ii) Cetak biru jasa logistik nasional iii) Penyempurnaan	Juni 2008 November 2008 Desember 2008	Terkoordinasinya kebijakan di bidang jasa logistik demi meningkatnya efisiensi penyediaan jasa logistik nasional.	2. Sinkronisasi ... Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			peraturan-peraturan yang menyangkut jasa logistik	- berlanjut		
D. Pengamanan Pasar	1. Pengawasan Perkembangan Impor Ekspor	Meningkatkan pemantauan dan mengidentifikasi secara intensif perkembangan peningkatan impor dan penurunan ekspor sebagai dasar pengamanan pasar jangka pendek	i) Pembentukan Forum Komunikasi Perlindungan Usaha dan Konsumen	Juni 2008 – berlanjut	Mengawasi dan menyelesaikan gangguan impor ekspor	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
			ii) Rekomendasi permintaan tindak lanjut dalam upaya peningkatan ekspor dan penurunan impor			Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	2. Penguatan Instrumen Perlindungan Gangguan Ekspor dan Impor	Peningkatan pengawasan <i>Illegal Transshipment, circumvention, labelling, Standard and Conformance.</i>	i) Implementasi otomasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di 28 Instansi Penerbit SKA (IPSKA)	Desember 2008	Tercegahnya kegiatan <i>illegal transshipment/ circumvention</i>	Menteri Perdagangan

ii) Rekomendasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 18 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Pengoperasian sistem aplikasi <i>data entry</i> di 57 IPSKA	Oktober 2008	Tersedianya sarana komunikasi on-line antara IPSKA dan Departemen Perdagangan	
			iii) Peraturan Menteri Perdagangan tentang SKA Impor	Juni 2008	Remedi (Penyembuhan/Pemulihan) terhadap industri di dalam negeri	
						iv) Pedoman ...
			iv) Pedoman bagi daerah tentang pengawasan illegal trading, kepatuhan ketentuan penggunaan label, dan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Agustus 2008	Meningkatkan partisipasi aktif Daerah dalam pemberantasan <i>illegal trading</i>	Menteri Perdagangan
						Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Penanggulangan Hambatan Ekspor	a. Memberikan pedoman tindakan bagi perwakilan Luar negeri, Pemda, dan pelaku usaha dalam menghadapi masalah ekspor yang menyangkut kebijakan negara lain	Penerbitan SOP/Mannual penanggulangan hambatan ekspor di luar negeri	Juli 2008	Adanya pegangan standar dalam mengatasi permasalahan ekspor di LN, seperti AD, CVD, SM, SPS, TBT.	Perdagangan
		b. menginventarisir dan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan praktek Negara lain yang menghambat ekspor Indonesia untuk mendapatkan penyelesaian secara bilateral	Daftar Berkala Kebijakan dan Praktek-praktek di negara lain yang menghambat ekspor Indonesia	Juni 2008 – berlanjut	Adanya acuan yang lebih akurat dalam pertemuan dan perundingan bilateral dengan negara mitra dagang	Menteri Perdagangan
	4. Pengembangan	Menyusunan database	<i>Indonesian Exporters</i>	Oktober 2008 –	Meluasnya informasi	Menteri Perdagangan

b. menginventarisir ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 20 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	pelaku ekspor	pelaku ekspor Indonesia yang kredibel	<i>Profile</i>	berlanjut	tentang pelaku ekspor Indonesia	

III. PERPAJAKAN ...

III. PERPAJAKAN						
Meningkatkan Pelayanan Perpajakan	1. Percepatan proses pelayanan atau penyelesaian permohonan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) bagi Wajib Pajak (WP) persyaratan tertentu	Memperluas kelompok Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang berhak memperoleh pengembalian pendahuluan	Peraturan Menteri Keuangan	Agustus 2008	Penambahan jumlah Wajib Pajak yang memperoleh restitusi PPN dalam jangka waktu 7 hari	Menteri Keuangan
	2. Penyediaan layanan prima bagi Wajib Pajak	Membentuk 128 KPP Pratama di luar Pulau Jawa & Bali yang berbasis sistem	KEP Dirjen Pajak	Desember 2008	Pelayanan yang lebih baik dan terintegrasi untuk semua Wajib	Menteri Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 21 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan peningkatan <i>Built-in Control System</i>	administrasi modern			Pajak.	
	3. Penyederhanaan mekanisme pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25, bagi Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran secara <i>on-line</i> .	Menyederhanakan proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 bagi WP yang melakukan pembayaran secara <i>on-line</i>	Peraturan Dirjen Pajak	Juni 2008	Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 secara <i>on-line</i> tidak perlu menyampaikan SPT Masa ke KPP	3. Penyederhanaan ... Menteri Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB

B. KEBIJAKAN ...

B. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
I. STABILITAS SISTEM KEUANGAN						
A. Memperkuat Mekanisme Koordinasi Sektor Keuangan	1. Penyusunan regulasi penanganan krisis keuangan	a. Penyelesaian RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)	Penyampaian draf final RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan kepada DPR	Agustus 2008	Kepastian landasan hukum Penanganan Krisis Sektor Keuangan	Menteri Keuangan berkoordinasi Gubernur Bank Indonesia.
		b. Penyiapan Protokol Manajemen Krisis Keuangan	Protokol Manajemen Krisis Keuangan	Juli 2008	Kepastian Tata Cara/Protokol pelaksanaan Manajemen Krisis Keuangan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Operasionalisasi Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK)	a. Penguatan Forum Stabilitas Sistem Keuangan	Revisi SKB Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia	Agustus 2008	Peningkatan efektivitas FSSK	Menteri Keuangan berkoordinasi Gubernur Bank Indonesia
		b. Penyusunan ASKI (Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia)	ASKI	Oktober 2008	Sektor keuangan semakin sehat dan berkembang	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
		c. Pengembangan dan penerapan <i>Early Warning System</i> (EWS) sektor keuangan	Penerbitan hasil <i>Model Macro EWS</i> secara teratur	Desember 2008	<i>Macro EWS</i> telah digunakan secara efektif	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

b. Penyusunan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
B. Harmonisasi Kebijakan Sektor Keuangan	1. Pengembangan peraturan dan pengawasan produk <i>offshore</i> di pasar keuangan domestik	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyempurnaan regulasi dan pengembangan sistem monitor terkait produk pasar keuangan <i>offshore</i>	Regulasi dan Usulan Sistem Pelaporan yang terkait dengan produk pasar keuangan <i>offshore</i>	Juni 2008 - berlanjut	Terwujudnya sistem monitor perkembangan <i>offshore product</i> di pasar keuangan domestik	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia
	2. Penyempurnaan pengaturan dan pengawasan pasar surat utang (obligasi)	a. Pengkajian tentang konsolidasi dan integrasi sistem kliring dan <i>settlement</i> transaksi surat utang (obligasi)	Hasil kajian tentang sistem kliring dan <i>settlement</i> surat utang (obligasi)	Desember 2008	Sistem kliring dan <i>settlement</i> yang lebih efisien, kredibel dan transparan	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia
		b. Penyusunan pengaturan sistem kliring dan <i>settlement</i> transaksi surat utang	Peraturan sistem kliring dan <i>settlement</i> transaksi surat utang	Juni 2009		
	3. Penguatan pengawasan terhadap bank	Penyusunan ketentuan pengawasan bank yang memiliki perjanjian	Peraturan Bank Indonesia	Agustus 2008	Terbentuknya sistem pengawasan bank yang semakin efektif	Menteri Keuangan berkoordinasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 25 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	yang menjadi <i>selling agent</i> untuk produk asuransi dan reksa dana.	<i>bancassurance</i> , dan agen reksa dana				dengan Gubernur Bank Indonesia
C. Memperkuat sistem keuangan	Perluasan cakupan Sistem Informasi Debitur (SID)	Meningkatkan cakupan informasi Biro Informasi Kredit (BIK)	Tercakupnya data perusahaan pelayanan umum (perusahaan utilitas) pada SID	Desember 2008	Peningkatan pelayanan Biro Informasi Kredit	C. Memperkuat ... Menteri Koordinator Bidang Perkonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia
II. LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN						
Memperkuat lembaga keuangan perbankan	Penguatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Menyusun arah kebijakan pengembangan BPR di masa mendatang melalui peningkatan peran dan kontribusi BPR dalam mendukung pengembangan	Cetak Biru strategi pengembangan BPR	Desember 2008	Terdapatnya strategi pengembangan BPR yang mendukung perkembangan ekonomi lokal	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 26 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		ekonomi lokal				Gubernur Bank Indonesia

III. LEMBAGA ...

III. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK						
A. Memperkuat Sektor Industri Asuransi	Meningkatkan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi	a) Melakukan kajian mengenai urgensi dan pra kondisi untuk program perlindungan pemegang polis asuransi	Kajian akademik mengenai urgensi dan prakondisi untuk program perlindungan pemegang polis asuransi	November 2009	Menyehatkan industri asuransi dan perlindungan terhadap peserta asuransi semakin baik	Menteri Keuangan
		b) Pengembangan <i>database</i> profil risiko untuk usaha asuransi, kendaraan bermotor dan pemberian akses kepada industri	Database profil risiko yang digunakan perusahaan asuransi dalam menetapkan tarif preminya	November 2009		
B. Memperkuat sektor Industri Dana Pensiun	1. Pengembangan pengawasan dana pensiun berbasis risiko	Memperkuat pengawasan dana pensiun dengan penerapan Sistem Pemeringkatan Risiko	Revisi Manual Pemeriksaan Dana Pensiun	September 2008	Peningkatan kesehatan industri dana pensiun	Menteri Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan			
						2. Penguatan ...
	2. Penguatan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan	Menyusun Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan	Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan	Juni 2008	Peningkatan kesehatan perusahaan pembiayaan	Menteri Keuangan
	3. Pendirian lembaga pembiayaan pembangunan	Pengkajian pendirian lembaga pembiayaan pembangunan	Rekomendasi tentang pendirian lembaga pembiayaan pembangunan	Desember 2008	Berkembangnya sumber dana jangka panjang	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
D. Pengembangan Usaha Jasa Gadai	Penyiapan RUU tentang Usaha Jasa Gadai	Pembahasan dalam Panitia Antar Departemen RUU tentang Usaha Jasa Gadai	Draf RUU tentang Usaha Jasa Gadai di sampaikan kepada Presiden	Desember 2008	Meningkatkan jasa layanan gadai dengan membuka persaingan pasar	Menteri Keuangan
E. Pengembangan Lembaga Penjamin Kredit	1. Pengembangan Perusahaan Penjaminan Kredit termasuk penjaminan untuk UKM	Pengaturan pendirian dan operasi perusahaan penjaminan kredit	Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang	Juli 2008	Lembaga Penjamin Kredit berkembang	Menteri Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 29 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			Kredit			
	2. Penguatan Pengawasan Perusahaan Penjaminan Kredit	Penyusunan pedoman pemeriksaan perusahaan penjaminan kredit	Peraturan Ketua Bapepam-LK	Desember 2008	Lembaga Penjamin Kredit berkembang	2. Penguatan ... Menteri Keuangan
IV. PASAR MODAL						
A. Peningkatan peran pasar modal dalam perekonomian nasional	1. Pengembangan pasar Surat Berharga Negara	Pengembangan Infrastruktur Kuotasi <i>Dealer</i> Utama	Sistem Kuotasi <i>Dealer</i> Utama	Oktober 2008	Memperluas dan memperdalam basis investor	Menteri Keuangan
	2. Peningkatan efisiensi transaksi obligasi dan efektifitas perlakuan pajak transaksi obligasi	Melakukan kajian perlakuan pajak atas transaksi obligasi	Hasil kajian perlakuan pajak atas transaksi obligasi.	Agustus 2008		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 30 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penerapan dan pengawasan <i>margin trading</i> dan <i>short selling</i>	Menyusun perubahan peraturan Bapepam-LK terkait <i>margin trading</i> dan <i>short selling</i>	Perubahan peraturan Bapepam-LK terkait <i>margin trading</i> dan <i>short selling</i>	Juni 2008	Meningkatkan disiplin pelaku pasar	3. Peningkatan ... Menteri Keuangan
B.Mengembangkan produk syariah	1. Pengembangan Produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	a. Melaksanakan dan menyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara	i) Peraturan Pemerintah mengenai perusahaan penerbit SBSN	Juni 2008	Produk Surat Berharga Syariah Negara semakin berkembang	
			ii) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penerbitan SBSN	Juli 2008		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iii) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Barang Milik Negara yang dapat digunakan sebagai aset SBSN	Juli 2008	Produk Surat Berharga Syariah Negara semakin berkembang	Menteri Keuangan
			iv) Penerbitan SBSN <i>Ijarah Sale dan Lease Back</i>	Juli 2008		
			v) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUD) mengenai desain instrumen dan metode penerbitan SBSN <i>Ijarah Sale dan Lease Back</i>	Juni 2008	Produk Surat Berharga Syariah Negara semakin berkembang	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

iii) Peraturan ...

b. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Pengembangan Produk SBSN	Hasil kajian mengenai desain instrumen SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur	Desember 2008	Terlaksananya penerbitan SBSN khusus untuk pembiayaan proyek infrastruktur	Menteri Keuangan
V. PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)						
Peningkatan kinerja BUMN	1. Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN	a. Optimalisasi BUMN melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk BUMN	Pengurangan jumlah BUMN dari 139 menjadi 87.	Oktober 2008 - berlanjut	Peningkatan efisiensi, daya saing, pelayanan masyarakat dan kinerja BUMN	Menteri Negara BUMN
		b. Penyebaran kepemilikan saham BUMN melalui IPO dan <i>Strategic Sale</i>	Privatisasi terhadap 44 BUMN dan perusahaan minoritas baik divestasi saham negara maupun penerbitan saham baru.	November 2008 - berlanjut		

2. Harmonisasi ...

--	--	--	--	--	--	--



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 33 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Harmonisasi peraturan perundangan terkait BUMN	a. Evaluasi peraturan perundangan sektor yang terkait dengan BUMN	Rekomendasi penyempurnaan peraturan yang terkait dengan BUMN	Desember 2008 - berlanjut	Tercapainya keselarasan peraturan yang terkait dengan BUMN	Menteri Negara BUMN berkordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan
		b. Perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara	Penyampaian draft Rancangan Undang-Undang Piutang yang memuat perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, kepada Presiden	Juni 2009	Tersusunnya ketentuan piutang BUMN yang harmonis	Menteri Keuangan

VI. PENCEGAHAN...

VI. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan peran efektif industri keuangan sebagai lini depan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Peningkatan ketaatan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atas Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan kewajiban pelaporan kepada PPATK	a. Mengembangkan modul-modul <i>e-learning</i> mengenai PMN dan sistem anti pencucian uang	i) Modul <i>e-learning</i> untuk industri perbankan	Agustus 2008	Tersedianya bahan pelatihan yang dapat diakses oleh PJK untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan PJK dalam menerapkan PMN dan melaksanakan kewajiban pelaporan	Kepala PPATK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
			ii) Modul <i>e-learning</i> untuk PJK Pasar Modal	Oktober 2008		
			iii) Modul <i>e-learning</i> untuk Industri asuransi dan dana pensiun	Januari 2009		
			iv) Modul <i>e-learning</i> untuk lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura	November 2008		

b. Menyiapkan ...

		b. Menyiapkan pedoman	Pedoman PPATK	Desember 2008	Berkurangnya beban	Kepala PPATK
--	--	-----------------------	---------------	---------------	--------------------	--------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 35 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		kebijakan berbasis risiko	mengenai penerapan kebijakan anti-pencucian uang berbasis risiko		administrasi bagi PJK dalam menerapkan PMN dan melaksanakan kewajiban pelaporan, serta beban pengawasan regulator dan PPATK	berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
		c. Melakukan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bekerjasama dengan asosiasi industri/ sektor terkait	Pelatihan dan sosialisasi di berbagai kota di Indonesia	Juni 2008 dan berlanjut	Peningkatan yang signifikan jumlah pegawai PJK yang memahami dan terlatih dalam hal PMN dan sistem anti-pencucian uang	Kepala PPATK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

C. KETAHANAN ...

C. KETAHANAN ENERGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 36 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
A. Peningkatan Produksi Sektor Migas dan Pertambangan Non Migas	Penyederhanaan prosedur dan perbaikan iklim usaha sektor migas dan pertambangan non migas	a. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Harga Gas	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Harga Gas dan Pengusahaan Migas	Desember 2008	Meningkatnya penanaman modal migas dan pertambangan	Menteri ESDM
		b. Melakukan revisi Peraturan Menteri mengenai pengusahaan Migas (a.1.: kewajiban pemenuhan kebutuhan minyak DN; <i>cost recovery</i> ; perlindungan konsumen)	Revisi Peraturan Menteri ESDM tentang Pengusahaan Migas			
		c. Melakukan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang hulu migas	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang hulu migas			

d. Menyusun ...

		d. Menyusun dan menyempurnakan	Peraturan Menteri ESDM tentang	Agustus 2009	Meningkatkan penanaman modal	Menteri ESDM
--	--	--------------------------------	--------------------------------	--------------	------------------------------	--------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		peraturan Pengolahan dan Pemurnian Mineral	Pengolahan dan Pemurnian Mineral		sektor pertambangan	
		e. Menyusun Cetak Biru: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kilang, jaringan pipa dan receiving terminal LNG dan LPG • Pembangunan jaringan infrastruktur penyimpanan dan pendistribusian BBM dan kilang BBM (kilang mini) 	Cetak Biru pengembangan infrastruktur migas	Desember 2008	Meningkatkan infrastruktur migas	Menteri ESDM
B. Peningkatan produksi sektor kelistrikan	1. Penyederhanaan prosedur iklim usaha sektor kelistrikan	Menyederhanakan prosedur Pembangunan Listrik Swasta (<i>Independent Power Producer (IPP)</i>)	Peraturan Menteri ESDM tentang prosedur IPP	Desember 2008	Memperpendek jumlah hari penyelesaian <i>Power Purchasing Agreement (PPA)</i> dari 445 hari menjadi 355 hari	Menteri ESDM
	2. Perluasan akses listrik pedesaan	a. Membuat kerangka kebijakan listrik pedesaan	Cetak biru Pengembangan Listrik Pedesaan (antara lain: sasaran,	Desember 2008	Tersedianya listrik di daerah terpencil	2. Perluasan ... Menteri ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			kebijakan, strategi, rencana tindak)			
		b. Penyediaan APBN untuk listrik pedesaan	2008 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) : 745 kW; Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS): 19.555 unit; PLTS Terpusat: 10 unit; Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB): 151 unit; Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya: 2 unit. 2009 PLTMH: 2.680 kW; PLTB: 6 unit; PLTS: 77.440 unit	2008 - 2009	Tersedianya listrik di daerah terpencil	Menteri ESDM
		c. Penyederhanaan Perizinan listrik skala kecil (<1MW)	Peraturan Menteri ESDM tentang perijinan listrik skala kecil	Agustus 2008	Prosedur lebih sederhana; Usaha pembangkit skala kecil	Menteri ESDM

c. Penyederhanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 39 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					berkembang	
C. Perbaiki tata kelola sektor migas dan pertambangan	Peningkatan transparansi dalam pengelolaan migas dan pertambangan	a. Menyusun Kesepakatan Bersama antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan dalam pengelolaan migas dan pertambangan	MoU antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan	Juni 2008	Makin transparan pengelolaan fiskal sektor migas dan pertambangan	Menteri ESDM dan Menteri Keuangan
		b. Menyusun peraturan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM dalam kerangka Peningkatan transparansi dalam pengelolaan migas dan pertambangan	Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri ESDM	Juni 2009		

D. Diversifikasi ...

D. Diversifikasi energi	1. Program percepatan pengembangan Energi Alternatif	Percepatan Produksi dan Pemanfaatan energi alternatif	Cetak Biru Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025	Desember 2008	Tersedianya energi alternatif Terjadinya konversi energi	Menteri ESDM
-------------------------	--	---	--	---------------	---	--------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 40 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Pengembangan Bahan Bakar nabati (BBN)	Penetapan kebijakan penggunaan BBN kepada industri	Peraturan Menteri Perindustrian	September 2009	Peningkatan penggunaan BBN	Menteri Perindustrian
	3. Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME)	Penyusunan rencana strategis pengembangan DME	Rencana strategis pengembangan DME	Desember 2008	Tersedianya energi alternatif di pedesaan	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

D. SUMBER ...

D. SUMBER DAYA ALAM , LINGKUNGAN DAN PERTANIAN

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
A. Peningkatan kualitas	Percepatan pengurangan emisi	Melaksanakan REDD (<i>Reducing Emissions from</i>	Peraturan Bersama Menteri Kehutanan	Desember 2008	Terjadinya Penurunan emisi	Menteri Kehutanan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 41 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
lingkungan		<i>Deforestation and Degradation)</i>	dan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai Program dan mekanisme kerja pengurangan emisi dari <i>deforestation</i>			Menteri Negara Lingkungan Hidup
		Melaksanakan DNS (<i>Debt for Nature Swap</i>)	Penyusunan Perjanjian dengan Pemerintah Amerika Serikat mengenai DNS-TFCA (<i>Tropical Forest Conservation Act</i>)	September 2008	Peningkatan kualitas hutan dan Penurunan hutang	Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		Mendorong pelaksanaan CDM (<i>Clean Development Mechanism</i>) untuk pembiayaan <i>Carbon Credit</i>	Peraturan Bersama Menteri ESDM dan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Ketentuan CDM sektor energi	Desember 2008	Penurunan biaya perbaikan lingkungan	Menteri ESDM dan Menteri Negara Lingkungan Hidup
		Pemanfaatan Energi Panas Bumi untuk listrik	Peraturan Menteri mengenai pedoman harga jual listrik dari Pembangkit Listrik	Agustus 2008	Keandalan pasokan listrik meningkat	Menteri ESDM

Pemanfaatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 42 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			Tenaga Panas Bumi			
B. Rehabilitasi Lahan	Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	a. Rehabilitasi dan Pengelolaan DAS untuk mengurangi banjir, kekeringan, dan pencemaran air	Kerangka Kerja Pengelolaan DAS	Desember 2008	Berkurangnya bencana banjir, kekeringan, dan pencemaran air	Menteri Kehutanan
		b. Pelaksanaan <i>Pilot Project</i> penanganan DAS Terpadu di Sub-DAS Keduang, Kabupaten Wonogiri	Cetak Biru Pola Penanganan DAS Terpadu	Desember 2008	Meningkatnya keterpaduan penanganan DAS dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim global	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	Rehabilitasi Lahan Kritis	Percepatan rehabilitasi lahan kritis	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi & Reklamasi Hutan	Desember 2008	Perbaikan Kawasan Hutan	Rehabilitasi ... Menteri Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	Rehabilitasi & reklamasi	Percepatan perlindungan terhadap abrasi tsunami & intrusi air laut	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengelolaan Mangrove	Desember 2008	Mengurangi dampak abrasi & intrusi air laut	Menteri Kehutanan
	Pemanfaatan Areal yang telah dilepas dari kawasan tetapi tidak aktif	Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pemanfaatan Areal yang telah Dilepas dari Kawasan	Peraturan Menteri Pertanian	Desember 2008	Pemanfaatan areal yang telah dilepas dari kawasan lebih optimal	Menteri Pertanian
C. Pengendalian Subsidi	Subsidi Pertanian Terpadu	Sinkronisasi dan monitoring evaluasi Subsidi Pertanian Tahun 2008	Keputusan Menteri Keuangan mengenai Subsidi Pertanian Terpadu	Desember 2008	Terlaksananya pemberian subsidi pertanian secara efektif dan efisien	Menteri Keuangan

D. Rehabilitasi ...

D. Rehabilitasi infrastruktur	1. Rehabilitasi Irigasi Pertanian	Rehabilitasi 500 ribu hektar daerah irigasi senta produksi pangan utama.	Optimalisasi Infrastruktur Irigasi di daerah sentra produksi pangan utama	April 2009	Peningkatan Produktivitas Lahan irigasi	Menteri Pekerjaan Umum
-------------------------------	-----------------------------------	--	---	------------	---	------------------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 44 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Penetapan tata ruang kawasan Merauke	Penyusunan dan penetapan tata ruang kawasan	Rekomendasi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dan Perda Propinsi tentang Tata Ruang Merauke	Desember 2008	Peningkatan investasi pertanian dan penyediaan lahan pangan	Menteri Pekerjaan Umum dan Gubernur Papua
E. Peningkatan investasi pangan	Fasilitasi investasi pangan	Penyusunan kebijakan <i>food estate</i>	Keputusan Menteri Pertanian berkaitan dengan <i>food estate</i>	Oktober 2008	Peningkatan investasi pertanian pangan	Menteri Pertanian

E. USAHA ...

E. USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
-----------	---------	----------	----------	---------------------	---------	------------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 45 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
A. Perluasan Akses Pembiayaan	1. Restrukturisasi Dana Bergulir	Penyelesaian Permenkeu tentang Optimalisasi Pengelolaan Dana Bergulir.	Peraturan Menteri Keuangan	Juni 2008	Tertib pengelolaan anggaran dan efektifitas program pembiayaan UMKM	Menteri Keuangan
	2. Peningkatan penerbitan Sertifikasi Tanah untuk Penjaminan Kredit UMKM	Memberikan kejelasan dan Kecepatan Alokasi Dana, dan Simplifikasi Mekanisme dan Prosedur Sertifikasi, serta Pengawasan dan Pengendalian	Pedoman BPN tentang Percepatan Sertifikasi Tanah UMKM	Juni 2008	Percepatan penerbitan sertifikasi tanah UMKM	Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
	3. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro	a. Memperkuat peran Komnas Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia (PKMI)	Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia	Juli 2008	Optimalisasi pembiayaan mikro bagi UMKM	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

		b. Mempercepat proses perolehan pembiayaan	Proses pembiayaan keuangan mikro	Agustus 2008 – berlanjut	Kemudahan memperoleh kredit	b. Mempercepat ... Menteri Koordinator
--	--	--	----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 46 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		keuangan mikro	melalui Portal Pusat Inovasi-UMKM		mikro	Bidang Perekonomian
		c. Menetapkan Strategi Pengembangan Keuangan Mikro	SKB Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Keuangan Mikro	Desember 2008	Terintegrasinya pembiayaan mikro dalam sistem keuangan nasional	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	4. Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	a. Evaluasi pelaksanaan KUR b. Perluasan bank pelaksana c. Penyaluran KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro (linkage)	Penyempurnaan Pelaksanaan KUR khusus kredit mikro di bawah Rp. 5 juta	Juli 2008	KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur BI

5. Linkage ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	5. <i>Linkage program</i> antara bank umum peserta KUR dengan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Usaha Jasa Keuangan Syariah Koperasi	Mendorong sinergi bank umum dan koperasi dalam penyediaan kredit UMKM	i) Pedoman Umum <i>linkage program</i> KUR	September 2008	Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi koperasi UMK, terwujudnya penyaluran kredit dan dana perbankan kepada usaha mikro skala rumah tangga dibawah Rp.10 juta, dan mempercepat pelaksanaan program penjaminan kredit bagi UMKK	Menteri Negara Koperasi dan UKM
			ii) Inventarisasi Koperasi calon peserta linkage program			
	6. Peningkatan Peran Koperasi Simpan Pinjam, Usaha Simpan Pinjam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS)	a. Penyusunan SOP Manajemen dan Prosedur bagi KJKS/UJKS Koperasi	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM	Juni 2008	Terwujudnya Pengelola KJKS/UJKS Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri koperasi dan prinsip syariah	Menteri Negara Koperasi dan UKM
						b. Pengawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Pengawasan KJKS/UJKS Koperasi	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Pengawasan KJKS/UJKS Koperasi	Juni 2008	Terlaksananya pengawasan pengendalian internal KJKS/UJKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Menteri Negara Koperasi dan UKM
		c. Pengawasan KSP/USP Koperasi	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Pengawasan KSP/USP Koperasi	Juni 2008	Terlaksananya pengawasan pengendalian internal KSP/UKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Menteri Negara Koperasi dan UKM
		d. Penilaian kesehatan KJKS/UJKS Koperasi	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Penilaian kesehatan KJKS/UJKS Koperasi	Juni 2008	Terwujudnya pengelola KJKS/UJKS Koperasi yang sehat dan mantap, efektif, efisien, dan profesional	Menteri Negara Koperasi dan UKM
		e. Penilaian kesehatan	Peraturan Menteri	Juni 2008	Terwujudnya	e. Penilaian ... Menteri Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 49 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		KSP/USP Koperasi	Negara Koperasi dan UKM tentang Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi		pengelola KSP/USP Koperasi yang sehat dan mantap, efektif, efisien, dan profesional	Koperasi dan UKM
		f. Peningkatan mutu SDM dan Manajemen melalui dan sertifikasi pengelolaan jasa keuangan	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Peningkatan Mutu SDM Pengelola Jasa Keuangan	Juli 2008	Terwujudnya SDM pengelola jasa keuangan yang profesional, dan meningkatnya kualitas manajemen koperasi jasa keuangan	Menteri Negara Koperasi dan UKM

B. Perluasan ...

B. Perluasan Akses Pasar Bagi	1. Peningkatan pelayanan ekspor	a. Menata dan mendesign kembali sistem dan tata	i) Design dan tatalaksana SAP	Desember 2008	Tersedianya sistem yang efektif untuk	Menteri Keuangan
-------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	---------------	---------------------------------------	------------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 50 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
UMKM	produk UMKM melalui penyempurnaan prosedur Pemberitahuan Konsoolidasi Barang Ekspor (PKBE)	laksana Sistem Aplikasi Pelayanan (SAP) Ekspor untuk barang konsolidasi.	ekspor khusus untuk barang konsolidasi (SAP-PKBE) yang sesuai standar internasional dan memenuhi kebutuhan UMKM		pelayanan dokumen kepabeananan bagi eksportir barang konsolidasi termasuk UMKM karena pelaku UMKM mendapat kejelasan prosedur, biaya, dan waktu yang terkait pelayanan dokumen barang yang terkondolidasi	

ii) Sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 51 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Sistem pelayanan PKBE <i>online</i> yang terintegrasi ke dalam sistem NSW	Desember 2008	Tersedianya sistem yang efektif untuk pelayanan dokumen kepabeanan bagi eksportir barang konsolidasi termasuk UMKM karena pelaku UMKM mendapat kejelasan prosedur, biaya, dan waktu yang terkait pelayanan dokumen barang yang terkondolidasi	Menteri Keuangan
		b. Merevisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Dokumen PKBE	Peraturan Menteri Keuangan tentang PKBE	Desember 2008	Tersedianya peraturan yang lebih jelas mengenai prosedur penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean berupa PKBE	Menteri Keuangan

c. Penyederhanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 52 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. Penyederhanaan prosedur PKBE untuk produk UMKM	Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Laksana Ekspor Khusus untuk Produk UMKM	Desember 2008	Terwujudnya transparansi dan keakuratan data dalam penyelesaian dokumen kepabeanaan untuk ekspor barang konsolidasi termasuk UMKM	Menteri Keuangan
	2. Peningkatan peluang pasar bagi UMKM dalam pengembangan penanaman modal dan ekspor	Pendirian Kawasan UMKM di dalam Kawasan Ekonomi	<i>Pilot Project</i> Kawasan UMKM di Batam	Desember 2008	Terbukanya peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan Kawasan Ekonomi sebagai tempat pengembangan usaha berbasis outsourcing	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

3. Perluasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 53 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Perluasan pasar ekspor produk UMKM	a. Membuat <i>database on-line</i> mitra dagang dan penanaman modal UMKM	<i>Database</i> mitra dagang dan penanaman modal UMKM secara <i>on-line</i>	Agustus 2008 – berlanjut	Tersedianya informasi mengenai mitra dagang dan penanaman modal di luar negeri untuk memperluas pasar dan pengembangan UMKM	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		b. Mendorong efektifitas Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP)	Kebijakan Pengembangan OVOP 2008 – 2009	Oktober 2008	Berkembangnya sinergi produksi dan pasar	Menteri Perindustrian
		c. Meningkatkan pasar ekspor UMKM melalui perdagangan lintas batas.	Peningkatan kelembagaan <i>marketing point</i> di wilayah perbatasan	Agustus 2008 – berlanjut	Meningkatkan akses pasar UMKM dalam perdagangan lintas batas.	Menteri Perdagangan

d. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 54 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		d. Meningkatkan keikutsertaan UMKM dalam Promosi <i>Tourism Trade and Investment</i> (TTI) di luar negeri	Diseminasi Daftar Rencana Pemeran/ Promosi TTI dan Persyaratan Keikutsertaan UMKM	Juni 2008 - berlanjut	Meningkatnya keikutsertaan UMKM dalam TTI	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	4. Peluang UMKM dalam Kegiatan <i>Meeting Incentive Convention and Exhibition</i> (MICE)	Meningkatkan Penggunaan Produk UMKM dalam Kegiatan MICE	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penggunaan Jasa dan Produk UMKM dalam Kegiatan MICE	Juni 2008	Sinerji antara produksi UMKM dan kegiatan kepariwisataan	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
C. Peningkatan Kapasitas SDM/ Kewirausahaan	1. Peningkatan penggunaan teknologi	Peningkatan Peran Pusat Inovasi - UMKM	Membangun <i>Portal Gateway</i> UMKM, Intermediasi Teknologi dan <i>Innovative Findings</i> , Klinik HKI	Oktober 2008 berlanjut	Meningkatnya produktivitas, diversifikasi produk, nilai tambah, dan daya saing UMKM	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 55 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			<i>Kajian Technology Foresight</i>	Desember 2008	Tersusunnya skenario kebijakan pengembangan teknologi untuk UMKM dan tersedianya <i>database current and future technology</i>	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	2. Meningkatkan kapasitas pengembangan industri kreatif	Paket-paket pelatihan kewirusahaan (produksi, keuangan, dan pemasaran)	Paket pelatihan pengembangan industri kreatif tertentu (TIK, industri kerajinan dan barang seni) dan pengembangan industri kecil dan menengah tertentu (batu mulia dan perhiasan, gerabah dan keramik hias, serta makanan/ minuman ringan)	Juli 2008 – berlanjut	Meningkatnya produksi industri kreatif	Menteri Perindustrian

3. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 56 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Peningkatan Kewirausahaan UMKM di Daerah Tertentu	Sinkronisasi program pengembangan perekonomian rakyat di daerah tertentu (tertinggal, transmigrasi, pariwisata, dan optimalisasi potensi perempuan di suatu daerah)	Pengembangan produksi UMKM dan pasar tradisional di daerah tertentu	Agustus 2008 dan berlanjut	Meningkatnya peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Daerah	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	4. Pengembangan model Kemitraan	Kajian pengembangan model kemitraan	Konsep model kemitraan	Desember 2008	Terwujudnya konsep model kemitraan	Menteri Negara BUMN
D.Reformasi Regulasi	1. Penyederhanaan perizinan untuk Usaha Kecil dan Menengah serta registrasi bagi Usaha Mikro	a. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penyederhanaan perizinan Usaha Kecil dan Menengah dalam Permendagri tentang Pelayanan Satu Pintu	Laporan berkala tentang perkembangan Perda dan penyelesaian permasalahan perizinan Usaha Kecil Menengah	Juli 2008 - berlanjut	Adanya kemudahan perizinan untuk kegiatan Usaha Kecil dan Menengah.	Menteri Dalam Negeri

b. Penetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 57 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Penetapan mekanisme dan sistem registrasi bagi Usaha Mikro di daerah	<i>Standard Operating Procedure (SOP), Administrasi Publik</i> untuk usaha mikro	Agustus 2008	Kemudahan dalam registrasi Usaha Mikro	Menteri Dalam Negeri
	2. Pelaksanaan Undang-Undang tentang UMKM	Mempersiapkan peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Undang-Undang tentang UMKM	Peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang UMKM	Setelah Undang-Undang tentang UMKM diundangkan	Efektivitas pemberdayaan UMKM	Menteri Negara Koperasi dan UKM

3. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 58 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Pengembangan ekonomi kreatif	Mempersiapkan kerangka dasar dan kebijakan untuk Pengembangan ekonomi kreatif	i) Cetak Biru pengembangan ekonomi kreatif	Juni 2008	Mendorong pengembangan 14 industri kreatif secara sinergistis sebagai sumbangan ke pertumbuhan ekspor, lapangan kerja dan UKM	Menteri Perdagangan
			ii) Rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif (per departemen)	September 2008		

F. PELAKSANAAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 59 ~

F. PELAKSANAAN KOMITMEN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY – AEC*)

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (<i>ASEAN Economic Community - AEC</i>)	1. Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas	a. Penurunan dan Penghapusan Tarif Impor dari ASEAN	i) Peraturan Menteri Keuangan tentang penghapusan tarif Bea Masuk (BM) untuk produk- produk dalam <i>Priority Integration Sectors (PIS)</i> sesuai ketentuan ASEAN <i>Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors (2007)</i>	Desember 2008 - berlanjut	Pemenuhan komitmen AEC untuk penghapusan BM produk-produk dalam PIS dan mendorong peningkatan daya saing PIS dan hilirnya	Menteri Keuangan

ii) Kesiapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 60 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Kesiapan pemindahan produk <i>Sensitive List</i> (SL) ke dalam skema <i>Common Effective Preferential Tariff</i> (CEPT) pada Desember 2010	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	Menteri Perdagangan
			iii) Kesiapan penurunan tarif produk SL yang menjadi CEPT menjadi 0% – 5% pada Desember 2010	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	Menteri Keuangan
			iv) Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penghapusan produk <i>General Exception (GE) List</i> sesuai dengan Perjanjian CEPT	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	Menteri Perdagangan

b. Penghilangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 61 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Penghilangan <i>Non-Tariff Barriers</i>	i) Peraturan Menteri Perdagangan tentang Peningkatan Transparansi Mengikuti <i>Protocol on Notification Procedure and Surveillance Mechanism (2007)</i>	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	Menteri Perdagangan
			ii) Peraturan Menteri Perdagangan tentang <i>Standstill and Rollback (2007)</i>	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	

iii) Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 62 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iii)Peraturan Menteri Perdagangan tentang Deregulasi <i>Non-Tariff Barriers (NTBs)</i> untuk impor dari Negara-negara Anggota ASEAN sesuai dengan <i>Work Programme on NTBs Eliminations (2007)</i>	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	Menteri Perdagangan
			iv)Peraturan Menteri Perdagangan tentang Transparansi <i>Non-Tariff Measures (NTMs)</i>	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	

c. Rules...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 63 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. <i>Rules of Origin (ROO)</i>	i) Peraturan Menteri Perdagangan tentang Reformasi dan Perluasan <i>Rules of Origin (ROO) CEPT</i>	Desember 2009	Harmonisasi Peraturan ROO Indonesia dengan perluasan ROO CEPT	Menteri Perdagangan
			ii) Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyederhanaan Prosedur Sertifikasi Operasional untuk ROO CEPT (2007)	Desember 2009	Kelancaran dan kemudahan pengawasan arus barang	
		d. Fasilitasi Perdagangan	Peraturan Menteri Perdagangan tentang Mekanisme Kerjasama Perdagangan Regional	Desember 2009	Tersedianya pedoman kerjasama perdagangan regional	Menteri Perdagangan

e. *Customs...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 64 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		<i>e. Customs Integration</i>	Kesiapan Implementasi ASEAN <i>e-customs</i> pada Desember 2011	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC	Menteri Keuangan
		<i>f. Standards and Technical Barriers to Trade</i>	Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan harmonisasi standar sesuai <i>ASEAN Policy Guidelines on Standard and Conformance</i>	Desember 2008	Tersedianya acuan untuk proses produksi, impor dan ekspor	Menteri Perdagangan
	2. Komitmen AEC untuk Arus Jasa Secara Bebas	Melakukan koordinasi penerbitan peraturan untuk liberalisasi bidang jasa	Koordinasi penerbitan peraturan untuk liberalisasi bidang jasa	April 2008 – berlanjut	Memberikan kesatuan sikap dan konsistensi dalam perdagangan internasional di bidang jasa	Menteri Perdagangan

3. Komitmen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 65 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Komitmen AEC untuk Arus Penanaman modal Secara Bebas	Menerbitkan Cetak Biru Strategi Pengembangan Penanaman Modal dalam Menghadapi ASEAN <i>Comprehensive Investment (ACIA) 2015</i>	Cetak Biru Strategi Pengembangan Penanaman modal Dalam Menghadapi ASEAN <i>Comprehensive Investment Agreement (ACIA) 2015</i>	Desember 2009	Memberikan pedoman dalam pelaksanaan komitmen di bidang penanaman modal	Kepala BKPM
	4. Komitmen AEC untuk Arus Modal Secara Bebas	Melakukan kajian Harmonisasi Standar Pasar Modal ASEAN di Bidang <i>Offering Rules for Debt Securities, Disclosure Requirements and Distribution Rules</i>	Kajian Harmonisasi Standar Pasar Modal ASEAN di Bidang <i>Offering Rules for Debt Securities, Disclosure Requirements and Distribution Rules</i>	Desember 2009	Meningkatkan daya saing Pasar Modal Nasional	Menteri Keuangan

5. Komitmen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 66 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	5. Komitmen AEC untuk Arus Tenaga Kerja Terampil Secara Bebas	Menyusun Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Kompetensi dan Kualifikasi Keahlian untuk Pekerjaan dan Pelatihan yang Dibutuhkan Sektor	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Kompetensi dan Kualifikasi Keahlian untuk Pekerjaan dan Pelatihan yang Dibutuhkan Sektor	Desember 2009	Meningkatkan kualifikasi Tenaga Kerja Indonesia	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	6. Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan	Melakukan Harmonisasi Ketentuan Penggunaan Bahan Kimia untuk <i>Aquaculture</i> Sesuai Standar Internasional	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harmonisasi ketentuan Penggunaan Bahan Kimia untuk <i>Aquaculture</i> Sesuai Standar Internasional	Desember 2009	Meningkatkan mutu ekspor di bidang perikanan	Menteri Kelautan dan Perikanan

7. Komitmen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	7. Komitmen AEC untuk Menuju Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif	Menerbitkan peraturan dalam rangka melaksanakan Komitmen Menuju Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif	i) Peraturan Menteri Perhubungan tentang Implementasi <i>Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services</i>	Desember 2008	Pemenuhan komitmen AEC	Menteri Perhubungan
			ii) Peraturan Menteri ESDM berkaitan dengan Ratifikasi <i>MoU on ASEAN Power Grid</i>	Desember 2008	Pemenuhan komitmen AEC	Menteri ESDM
			iii) Peraturan Presiden tentang Ratifikasi <i>Protocol to Implement the Third Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)</i>	Desember 2008	Pemenuhan komitmen AEC	Menteri Keuangan

iv) Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 68 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iv) Peraturan Presiden tentang Ratifikasi <i>Protocol to Implement the Fourth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)</i>	Desember 2008	Pemenuhan komitmen AEC	Menteri Keuangan
			v) Peraturan Presiden tentang Ratifikasi <i>Protocol to Implement the Fifth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)</i>	Desember 2008	Pemenuhan komitmen AEC	

vi) Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 69 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			vi) Peraturan Presiden tentang Ratifikasi <i>Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors</i>	Desember 2008	Pemenuhan komitmen AEC	Menteri Perdagangan
	8. Sosialisasi Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015	Koordinasi Pelaksanaan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015	Laporan 6 bulanan	Juni 2008 - berlanjut	Mewujudkan integrasi regional dalam rangka meningkatkan daya saing global dan memudahkan bisnis dan konsumen memanfaatkan peluang pasar	Menteri Perdagangan

G. INFRASTRUKTUR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 70 ~

G. INFRASTRUKTUR

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
I. TARGET-TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR						
A. Dukungan Infrastruktur terhadap Perekonomian (<i>Economic Infrastructure</i>)	1. Pembangunan Jaringan Jalan Nasional dan Jembatan	a. Meningkatkan kapasitas jalan dan jaringan jalan nasional/ jalan tol pada jalur ekonomi utama	i) Tersedianya 4 lajur jalan antara Jakarta – Semarang	Februari 2009	Meningkatnya efisiensi transportasi/ angkutan barang & penumpang di jalur Pantura	Menteri Pekerjaan Umum
			ii) terselesaikannya pembangunan 204 km jalan di pantai timur Pulau Sumatera: Bakaheuni– Sukadana – Menggala	Agustus 2009	Mantapnya jalur lintas Timur Sumatera sehingga dapat menurunkan biaya transportasi darat di jalur ekonomi utama Pulau Sumatera	

iii) Berfungsinya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 71 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iii) Berfungsinya jalur Lintas Selatan Pulau Kalimantan: <ul style="list-style-type: none">• Pontianak-Tayan.• Tayan-Palangkaraya-Balikpapan-Samarinda• Dimulainya pembangunan Jembatan Tayan	Desember 2009	Menurunnya biaya transportasi darat di jalur ekonomi utama Pulau Kalimantan	Menteri Pekerjaan Umum
			iv) Berfungsinya jalur Lintas Barat Pulau Sulawesi : Makassar-Manado	Desember 2009	Menurunnya biaya transportasi darat di jalur ekonomi utama Pulau Sulawesi	

v) Terbangunnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			v) Terbangunnya 641 km Jalan Tol di Pulau Jawa dan Provinsi Sulawesi Selatan	Desember 2009	Meningkatnya efisiensi transportasi/angkutan barang & penumpang	
		b. Mempercepat pembangunan jembatan Suramadu	Terselesaikannya pembangunan Jembatan Suramadu	Maret 2009	Bertumbuhnya ekonomi di Wilayah Jawa-Madura	Menteri Pekerjaan Umum
		c. Melaksanakan <i>pilot project</i> ” pemeliharaan jalan dengan prinsip ” <i>performance based contract</i> ”	i) Pelaksanaan <i>extended warranty</i> period di 10 ruas jalan nasional	Desember 2008	Meningkatnya kualitas pelayanan jalan nasional	Menteri Pekerjaan Umum
			ii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang kebijakan pemeliharaan jalan dan jembatan	Desember 2009		

2. Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	a. Merevitalisasi perkeretaapian nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	i) Pemisahan operasi sarana dan prasarana perkeretaapian	Desember 2008	Meningkatnya kualitas pelayanan kereta api nasional	Menteri Perhubungan
ii) Pemisahan operasi manajemen kereta api Jabodetabek			Desember 2008	Menteri Negara BUMN		
iii) Pemisahan operasi manajemen kereta api Sumatera Selatan			Desember 2008			
b. Pembangunan dan operasionalisasi Jalur Kereta Api Bandara		i) Diselesaikannya pembangunan kereta api ke Bandara Soekarno-Hatta	Desember 2009	Meningkatkan aksesibilitas menuju Bandara	Menteri Perhubungan	
			ii) Diselesaikannya ...	Oktober 2009		Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 74 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			pembangunan kereta api ke Bandara Kualanamu – Medan sepanjang 26 km			Perhubungan
			iii) Beroperasinya Kereta Api Yogyakarta – Bandara Adi Sucipto	Agustus 2008		
		c. Menyusun Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007: i) Peraturan Pemerintah tentang Prasarana Perkeretaapian; ii) Peraturan Pemerintah tentang Sarana Perkeretaapian;	Juni 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya mutu pelayanan, keamanan, dan keselamatan • Meningkatnya peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan swasta 	Menteri Perhubungan
						iii) Peraturan ...
			iii) Peraturan			Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 75 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			Pemerintah tentang Lalu Lintas & Angkutan Kereta Api; iv) Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian.			Perhubungan
	3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara	Memperbaiki aksesibilitas transportasi udara di Indonesia	i) Penuntasan pembangunan pengembangan Bandara Hasanudin – Makassar	Desember 2009	Meningkatnya pelayanan bandara regional	Menteri Perhubungan
			ii) Beroperasinya bandara Kualanamu sebagai pengganti bandara Polonia, Medan	Oktober 2009	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan penerbangan	

4. Pembangunan ...

	4. Pembangunan Sarana dan	Pengembangan pelabuhan di Indonesia	i) Terelesaiakannya pengembangan	Desember 2009	• Meningkatnya kapasitas	Menteri Perhubungan
--	---------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 76 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	Prasarana Pelabuhan		fasilitas pelabuhan Tanjung Priok dengan peningkatan kapasitas alur/ kolam pelabuhan		<p>pelayanan transportasi laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kelancaran arus barang ekspor dan impor 	
			ii) terselesainya pembangunan pelabuhan Bojonegara untuk dapat dioperasikan secara terbatas	September 2009		

B. Peningkatan ...

B. Peningkatan Daya Saing Global	1. Percepatan Penyediaan Infrastruktur	Mengembangkan TIK melalui percepatan program-program flagship	i) Jaringan Pendidikan Nasional	November 2008	Meningkatnya kemampuan iptek & keahlian SDM	Menteri Pendidikan Nasional
----------------------------------	--	---	---------------------------------	---------------	---	-----------------------------



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 77 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	DeTIKNas <i>a. E-Pendidikan</i> Mengembangkan konten dengan melibatkan pengajar serta jaringan intranet	(Jardiknas) yang menghubungkan 24.015 kantor Diknas tingkat provinsi dan kabupaten, sekolah dan Perguruan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia		yang siap pakai	
			ii) Pengembangan Jardiknas hingga mencapai total 39.715 kantor Diknas tingkat provinsi dan kabupaten, sekolah dan PT di seluruh Indonesia	Desember 2009		

		<i>b. e-Procurement</i> Menyempurnakan model <i>e-tendering</i> dan pengembangan model	i) Beroperasinya <i>E-Procurement</i> di Bappenas (2007) dan Departemen	Desember 2008 dan berlanjut	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang dan jasa di Kantor-	<i>b. e-Procurement ..</i> Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
--	--	---	---	-----------------------------	---	--



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		<i>e-procurement</i> lainnya	Keuangan (2008), serta secara berkelanjutan diterapkan di kantor – kantor Pemerintah.		kantor Pemerintah	BAPPENAS
			ii) Penerapan <i>e-procurement</i> pada 5 provinsi: Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo (2008).	Desember 2008		

		<i>c. Palapa Ring</i> Membangun jaringan <i>back-bone</i> serat optik	Jaringan <i>back-bone</i> serat optik di Indonesia bagian timur yang menjangkau 11	Phase 1 : siap beroperasi Triwulan- I 2009 Phase VI (tahap	Terhubungnya seluruh kota/kabupaten di Kawasan Timur Indonesia dengan	<i>c. Palapa...</i> Menteri Komunikasi dan Informatika
--	--	--	--	---	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 79 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			Provinsi yang meliputi 30 Kabupaten/Kota	akhir) : siap beroperasi Triwulan-III 2010	serat optik	
		d. Menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Informatika dan Transasaksi Elektronik	i) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Transaksi Elektronik	September 2009	Terciptanya kepastian hukum di bidang informasi dan Transaksi Elektronik	Menteri Komunikasi dan Informatika
			ii) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik	September 2009	Terciptanya kepastian hukum di bidang informasi dan Transaksi Elektronik	ii) Peraturan ... Menteri Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 80 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iii) Peraturan Pemerintah tentang Pengelola Nama Domain			
			iv) Peraturan Pemerintah tentang <i>Lawful Interception</i>			
			v) Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Data Strategi			
	2. Internet gratis untuk SMU sederajat diseluruh Indonesia	Membangun prasarana internet	Pelayanan internet gratis pada 7000 SMU dan sederajat dan brlanjut hingga mencapai 17000 SMU dan sederajat	Desember 2008 dan berlanjut	Mempercepat penyediaan akses internet gratis di seluruh SMU dan sederajat	Menteri Pendidikan Nasional
						3. Pembangunan ...
	3. Pembangunan Telekomunikasi Pedesaan	Mempercepat pelaksanaan kebijakan Desa Berdering dan Desa Pintar melalui pembangunan Telepon baik inisiatif Pemda maupun APBN (USO);	i) Tersedianya akses telepon di 32 Provinsi yang mencakup 38.471 desa (Desa Berdering).	September 2009	Terwujudnya aksesibilitas telekomunikasi bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan dan jasa telekomunikasi	Menteri Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 81 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Penyediaan jasa internet pada 10 kecamatan terpilih sebagai pilot project (percontohan) dan secara berkelanjutan akan mencakup 43.825 desa pada tahun 2013 (Desa Pintar).	September 2009 - berlanjut		

C. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (<i>Basic Needs</i>)	1. Pengendalian Banjir	Mempercepat penyelesaian pembangunan drainase kota untuk pengendalian banjir, perbaikan tanggul dan normalisasi sungai di wilayah rawan banjir	i) terselesaikannya saluran Banjir Kanal Timur & Banjir Kanal Barat, dan normalisasi sungai-sungai di Jakarta.	Desember 2009	Menurunnya dampak banjir terhadap kegiatan perekonomian di wilayah tersebut	C. Pemenuhan ... Menteri Pekerjaan Umum
---	------------------------	--	--	---------------	---	--



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 82 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Perbaikan tanggul dan normalisasi Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas dan Sungai Pemali Juana	Desember 2008 dan berlanjut		
			iii) Saluran penyalur banjir Sungai Deli ke Sungai Percut	Desember 2008		

	2. Penyediaan sarana dan prasarana Air Minum	Mengembangkan kapasitas air minum di kawasan rawan air di perkotaan dan pedesaan serta meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	i) Peningkatan kapasitas produksi 5.700 l/dt untuk mendukung peningkatan cakupan air minum bagi 2,2 juta jiwa.	Desember 2008	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui persediaan prasarana dan sarana air minum	2. Penyediaan ... Menteri Pekerjaan Umum
--	--	--	--	---------------	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 83 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Peningkatan kapasitas produksi 6.600 l/dt untuk mendukung peningkatan cakupan air minum bagi 2,97 juta jiwa.	Desember 2009		
			iii) Peningkatan jumlah PDAM dengan kategori sehat sebanyak 24 PDAM	Desember 2008	Meningkatnya kinerja pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) oleh PDAM	Menteri Pekerjaan Umum
						iv) Peningkatan ...
			iv) Peningkatan jumlah PDAM dengan kategori sehat sebanyak 36 PDAM	Desember 2009		Menteri Pekerjaan Umum
	3. Pengelolaan Air Limbah	a. Membangun Prasarana dan Sarana Air Limbah Terpusat dan	i) Tersedianya pengelolaan air limbah terpusat di	Oktober 2008	Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan air	Menteri Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 84 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		Peningkatan Pelayanan Air Limbah Bagi Masyarakat	Denpasar dengan kapasitas pelayan 250.000 jiwa dan dikota-kota Medan, Cirebon, dan Surakarta dengan total kapasitas pelayanan bagi 27.370 jiwa		limbah serta mendorong Pemda menurunkan pembuangan air limbah secara terbuka	

			ii) Peningkatan cakupan pelayanan air limbah terpusat di Bandung dan Yogyakarta bagi 93.086 jiwa.	Desember 2009		ii) Peningkatan ... Menteri Pekerjaan Umum
--	--	--	---	---------------	--	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 85 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Menstimulasi Prasarana dan Sarana Sanitasi Komunal	Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 130 kawasan dengan cakupan pelayanan 66.000 jiwa	Desember 2008		

	4. Pengelolaan Persampahan	Membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional	i) Tersedianya TPA sampah Bangli untuk pelayanan secara regional di kawasan Sarbagita (Kota Denpasar, Kab. Bangli, dan Kab. Klungkung), dengan cakupan pelayanan 513.114 Jiwa	Desember 2008	Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan persampahan	4. Pengelolaan ... Menteri Pekerjaan Umum
--	----------------------------	--	---	---------------	--	--



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 86 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Tersedianya TPA sampah Gorontalo untuk pelayanan secara regional di Kota Gorontalo dan Kab. Gorontalo dengan cakupan pelayanan 295.714 Jiwa	Desember 2009		
	5. Penyediaan Angkutan Umum di daerah terisolasi, belum berkembang dan perbatasan	Menunjang angkutan keperintisan pada sektor perhubungan laut, perhubungan darat dan perhubungan udara	i) Terselenggaranya pelayanan angkutan udara perintis di 93 rute ii) Terselenggaranya Angkutan Darat perintis pada 128 trayek iii) Terselenggaranya penyeberangan perintis pada 73	Desember 2008	Mengurangi keterisolasian daerah	5. Penyediaan ... Menteri Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			rute			
			iv) Terselenggaranya pelayanan angkutan udara perintis di 93 rute	Desember 2009		
			v) Terselenggaranya Angkutan Darat perintis pada 160 trayek			

			vi) Terselenggaranya penyeberangan perintis pada 75 rute	Desember 2009	Mengurangi keterisolasian daerah	Menteri Perhubungan
	6. Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)	Peningkatan Infrastruktur Pedesaan di desa tertinggal/ desa miskin	i) Terbangunnya infrastruktur pedesaan di 1.800 desa tertinggal	Desember 2008	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar di desa tertinggal/ desa miskin	Menteri Pekerjaan Umum
			ii) Terbangunnya infrastruktur pedesaan di 3.250	Desember 2009		

vi) Terselenggaranya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 88 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			desa tertinggal			
	7. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)	Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan	Peningkatan sosial ekonomi masyarakat di 1.044 desa tertinggal dan perbatasan	Desember 2009	Meningkatkan perekonomian lokal di daerah tertinggal dan perbatasan	Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

	8. Pembangunan Perumahan	a. Pembangunan program 1.000 <i>tower</i> rumah susun sederhana	i) 78 <i>tower</i> rusuna yang merupakan lanjutan program 2007, ii) 68 <i>tower</i> rusuna yang merupakan program tahun 2008 dan iii) 219 <i>tower</i> rusuna yang merupakan program tahun	November 2008 Desember 2009 Desember 2010	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya rusuna bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM) khususnya MBR Berkembangnya sektor konstruksi dan pendukung melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat 	8. Pembangunan ... Menteri Negara Perumahan Rakyat
--	--------------------------	---	--	---	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 89 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			2008/2009;		kemiskinan • Tertatanya lingkungan perkotaan dengan konsep pembangunan pemukiman yang berkelanjutan	
		b. Evaluasi proses perijinan pembangunan perumahan	i) Hasil kajian	November 2008	Terjadinya percepatan dalam pembangunan perumahan rakyat/rumah susun	b. Evaluasi ... Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
			ii) Peraturan daerah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pemberian Kemudahan	Oktober 2008 dan berlanjut		Menteri Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 90 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			Perijinan dan insentif dalam rangka Percepatan Pembangunan Rusuna/Apartemen Rakyat di Kawasan Perkotaan			

II. PEMBANGUNAN ...

II. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN POLA KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS)						
Mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur	Mempercepat pembangunan infrastruktur dengan pola KPS	a. Menyusun tata cara pelaksanaan KPS dalam penyediaan infrastruktur	i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang tata cara pelaksanaan KPS dalam penyediaan infrastruktur (sektor air)	Desember 2008	Prosedur dan tata cara yang jelas untuk mengetahui durasi Proyek KPS	Menteri Pekerjaan Umum
			ii) Peraturan Menteri Perhubungan tentang tata cara pelaksanaan KPS dalam penyediaan infrastruktur	Desember 2008	Prosedur dan tata cara yang jelas untuk mengetahui durasi Proyek KPS	Menteri Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 91 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			(sektor kereta api)			

		b. Mempercepat pembangunan Model Proyek KPS di Indonesia	i) Dimulainya pembangunan PLTU Jawa Tengah, Pematang.	Desember 2009	Mendukung pasokan listrik di Jawa	b. Mempercepat ... Menteri ESDM, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS .
			ii) Beroperasinya Tangerang <i>Water Supply</i>	Desember 2009	Perluasan layanan air minum di Tangerang	Menteri Pekerjaan Umum
		c. Meningkatkan kualitas proyek-proyek KPS di pusat maupun daerah dengan memanfaatkan fasilitas <i>Project Development Facility</i>	Tersedianya <i>Feasibility Study</i> dan dokumen tender KPS	Desember 2008 dan berlanjut	Meningkatnya jumlah proyek KPS yang diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		(PDF)				

d. Menyusun ...

		d. Menyusun daftar proyek KPS - <i>PPP book</i> (KPS Book)	Tersedianya <i>PPP book</i> yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan infrastruktur	Desember 2008	Meningkatnya proyek kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
--	--	--	--	---------------	--	---

III. DUKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

A. Mempercepat penyediaan tanah dan pembiayaan	1. Percepatan Pengadaan dan Pencadangan Tanah	Menyusun Prosedur Tetap (Protap) proses Pengadaan dan Pencadangan Tanah untuk pembangunan infrastruktur	Protap Pengadaan dan Pencadangan Tanah untuk pembangunan infrastruktur	Oktober 2009	Kejelasan dalam proses Pengadaan dan Pencadangan Tanah	Kepala Badan Pertanahan Nasional
	2. Pembentukan Kelembagaan Keuangan non	Menyusun Peraturan dan mempersiapkan fasilitas pendukung kelembagaan	i) Peraturan Pemerintah tentang	Desember 2008	Meningkatnya proyek kerjasama Pemerintah dan	Menteri Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 93 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	Bank untuk Infrastruktur	keuangan non Bank untuk Infrastruktur	pembentukan Institusi <i>Guarantee Fund</i>		Swasta dalam penyediaan infrastruktur	
			ii) Beroperasinya <i>Infrastructure Fund</i> untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia	Desember 2008	Meningkatnya proyek kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur	ii) Beroperasinya ... Menteri Keuangan
B. Memperjelas kebijakan pemerintah dalam PSO	Merumuskan kebijakan PSO	Menyusun peraturan tentang kebijakan pelayanan umum (PSO) di bidang infrastruktur	Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan PSO	Desember 2008	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi PSO dalam rangka pelayanan masyarakat yang lebih baik	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 94 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
-----------	---------	----------	----------	---------------------	---------	------------------

H. BIDANG ...

H. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
A. Melanjutkan Penciptaan Hubungan Industrial yang kondusif	Revitalisasi Hubungan Industrial	a. Mendorong pembentukan dan Peningkatan Peran LKS Bipartit sebagai Forum Musyawarah dan Konsultasi antara Pekerja dan Pengusaha	i) Revisi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 255/MEN/2003 tentang Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit	November 2008	Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha di perusahaan-perusahaan.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			ii) Penyusunan Pedoman Penyuluhan Pembentukan LKS			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 95 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			Bipartit di Perusahaan			

b. Mendorong

		b. Mendorong Penyelesaian Perselisihan (Perselisihan Kepentingan, Perselisihan antar SP/SB, Perselisihan Hak, dan Perselisihan PHK) melalui perundingan Bipartit	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Melalui Perundingan Bipartit	November 2008	Mempercepat penyelesaian perselisihan antar pekerja dan pengusaha serta antar SP/SB.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		c. Mengoptimalkan Peran LKS Tripartit sebagai forum musyawarah dan konsultasi antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja	Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Peran LKS Tripartit Provinsi dan	November 2008	Terwujudnya kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dapat mendukung iklim hubungan industrial yang	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 96 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			Kabupaten/Kota		harmonis	
B. Memperkuat kelembagaan pelatihan dan produktivitas	Melanjutkan Revitalisasi Lembaga Pelatihan Kerja/BLK.	Meningkatkan kerja-sama Lembaga Pelatihan Kerja/BLK dengan lembaga pelatihan Perusahaan/swasta.	<p>i) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja dengan Swasta</p> <p>ii) 4 buah Kontrak Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta</p> <p>iii) 6 buah Kontrak Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta.</p>	<p>Agustus 2008</p> <p>Desember 2008</p> <p>Desember 2009</p>	<p>10 LPK berbasis kompetensi dan terakreditasi sesuai dengan kejuruan unggulan untuk bidang/kejuruan:</p> <p>(1) Otomotif (BLKI Semarang/BBPLKDN Bandung/BBPLKLN CEVEST/BBLKI Surakarta/BLKI Makassar)</p> <p>(2) Pengelasan (BLK Condet/BBLKI Serang/BBLKI Medan/BBPLKLN-CEVEST/BLKI</p>	B. Memperkuat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 97 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					Makassar)	

3) Logam

					(3) Logam/mesin (BBLKI Serang/ BBPLKLN CEVEST/BBLKI Medan/ BBPLKDN Bandung/ BLKI Samarinda) (4) Listrik (BBPLKLN CEVEST/BBLKI Serang/ BBPLKDN Bandung/BLKI Makassar/ BBLKI Medan/BBLKI	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan
--	--	--	--	--	---	--



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 98 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					Surakarta/BLKI Semarang/BLKI Ternate/BLKI Sorong).IT (BBPLKLN CEVEST/ BBPLKDN Bandung)	
					(5) Elektronika (BBPLKDN Bandung/ BBPLKLN CEVEST/BBLKI Medan/BLKI Makassar/ BBLKI Surakarta) (6) Konstruksi (Balai Pelatihan Jasa Konstruksi/ Peralatan Jakarta) (7) Perikanan/ budidaya (BPPP Ambon/Tegal/	(5) Elektronika Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 99 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					Medan) (8) Hortikultura (BPPP Lembang)	
					(9) Peternakan (BB Diklat Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan (BBDAPKH) Cinagara, Bogor) (10) Agribisnis/ Perkebunan (BDAPTPS) Binuang, Kalsel/ Kepindang, Malang)	(9) Peternakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 101 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			sawit, karet, agung, tebu dan jagung.		Kabupaten.	Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Gubernur, dan Bupati
			iii) Terciptanya lapangan kerja baru		c. Tahun 2009 terbentuk 14 KTM di 14 Kabupaten.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Gubernur, dan Bupati
			iv) Terbentuknya forum ekonomi masyarakat lokal.			
D. Perkuatan Sistem Data Base Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Integrasi Data Base TKI	Pembentukan <i>on-line system</i> dengan mengintegrasikan sistem informasi lintas instansi (sistem informasi kependudukan, <i>Job Order</i> , Paspur, Bursa Kerja) tentang TKI.	Terbentuknya data Based TKI secara <i>on-line system</i>	Desember 2008	Diperoleh data yang valid tentang jumlah TKI sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	Menteri Komunikasi dan Informatika

iii) Terciptanya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 102 ~

Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso